

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan umum kini mengambil peran baru sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi diri. Pendekatan layanan yang disebut Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Menurut Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI), peran perpustakaan umum dalam program ini melakukan pembinaan kepada perpustakaan di tingkat desa, sekolah dan komunitas, melaksanakan intervensi program dan menyediakan layanan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan program dengan berbagai stakeholder atau institusi pemerintah. Keberhasilan TPBIS sangat membutuhkan komitmen serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Secara spesifik, perpustakaan yang menerapkan TPBIS ini adalah perpustakaan yang sudah memfasilitasi pengembangan potensi masyarakat dengan memperhatikan keberagaman budaya, kemauan untuk berubah, serta menyediakan kesempatan untuk berwirausaha, melindungi budaya dan memperjuangkan HAM.

Tujuan dari TPBIS ini adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Tidak hanya itu, tujuan khusus dari TPBIS ini meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan perpustakaan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, dan membangun komitmen dan dukungan dari berbagai stakeholder agar transformasi perpustakaan dapat berkelanjutan. Strategi yang dipakai agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Aksi nyata dari strategi ini adalah menciptakan ruang untuk berbagai pengalaman, belajar kontekstual dan melatih keterampilan kerja. Indikator keberhasilan program ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan bertambahnya jumlah kemitraan antara perpustakaan dengan berbagai lembaga. (sitasi perpusnas).

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang berperan sebagai mitra program yang mendokumentasikan kegiatan untuk mendukung visi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu “Menciptakan masyarakat sejahtera

melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial”. Untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik, Dinarpus Kota Semarang menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berfungsi sebagai monitoring dan evaluasi yang dapat menghasilkan data faktual. Data yang dikumpulkan juga dapat menjadi bahan advokasi kepada pemangku kebijakan, dan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan perencanaan perpustakaan.

1. Pelaksanaan program TPBIS oleh Dinarpus Kota Semarang dilihat dari perspektif teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983) memberikan teori implementasi kebijakan yang paling berpengaruh dalam kajian kebijakan publik. Teori ini berfokus pada keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti struktur kebijakan, kemampuan pelaksana serta kondisi lingkungan sosial dan politik yang ada. Mazmanian dan Sabatier melihat implementasi sebagai proses yang panjang, dinilai dari penetapan kebijakan hingga munculnya dampak nyata di masyarakat. Dalam proses tersebut, berbagai stakeholder dan kondisi eksternal saling berinteraksi dalam mempengaruhi hasil akhir kebijakan.

Program Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) merupakan kebijakan nasional yang digagas oleh perpusnas dengan tujuan menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan diri, memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Sebagai lembaga pelaksana daerah, Dinarpus Kota Semarang memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan ini melalui berbagai program literasi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Teori mazmanian dan sabatier menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada rumusan kebijakannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh para pelaksana di lapangan dan bagaimana lingkungan sosial, politik, serta kelembagaan mendukung atau menghambat prosesnya. Teori Mazmanian dan Sabatier menganalisis melalui 3 aspek utama, yaitu karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam mengatur implementasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan. Melalui, ketiga aspek utama ini,

implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis secara komprehensif, mencakup sejauh mana kebijakan mampu diterjemahkan dengan baik di tingkat pelaksana, serta bagaimana faktor eksternal turut mendukung atau menghambat proses tersebut. Dalam pelaksanaan TPBIS oleh Dinarpus Kota Semarang, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan yang diajukan oleh perpustakaan tersebut diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya melalui kemitraan dengan kelurahan mitra seperti Lemponsari, Miroto, Pudukpayung dan Bandarharjo.

a) Karakteristik Masalah (Tractability of the Problem)

Masalah utama yang akan diatasi melalui program TPBIS adalah rendahnya literasi masyarakat dan terbatasnya peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial - ekonomi masyarakat. Permasalahan ini bersifat kompleks karena melibatkan aspek perilaku, sosial dan budaya masyarakat yang tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Dari hasil wawancara, Pak Sapto Petugas dari Dinarpus menyampaikan tujuan TPBIS bukan semata untuk meningkatkan minat baca, tetapi untuk mengubah paradigma atau pola pikir masyarakat tentang perpustakaan. Ia menjelaskan

“Melalui TPBIS, kami ingin masyarakat melihat perpustakaan bukan sekadar tempat peminjaman buku, tetapi tempat mereka bisa belajar berinteraksi dan berkembang secara sosial maupun ekonomi.” (Bapak Sapto, 24 September 2025).

Dalam teori Mazmanian dan Sabatier, karakteristik masalah yang kompleks menuntut adanya strategi implementasi yang adaptif dan inovatif. Dinarpus Kota Semarang menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada literasi dasar, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di beberapa perpustakaan kelurahan mitra TPBIS. Sejalan dengan teori tersebut, kompleksitas masalah menuntut pembuat dan pelaksana kebijakan untuk menyesuaikan metode implementasi agar sesuai dengan kondisi lokal. Dinarpus mampu menerjemahkan kebijakan nasional TPBIS ke dalam konteks sosial dan budaya Kota Semarang, menjadikannya sebagai pendekatan

transformasi sosial berbasis literasi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

- b) Kemampuan Kebijakan dalam mengatur Implementasi (Ability of the Statute to Structure implementation)

Mazmanian dan Sabatier memberikan penjelasan bahwa kemampuan kebijakan dalam menyusun implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan, dukungan sumber daya, mekanisme koordinasi, serta kapasitas pelaksana di lapangan. Dalam pelaksanaan TPBIS di Kota Semarang, implementasi kebijakan ini memiliki struktur pelaksanaan yang relatif jelas dan terarah. Dinarpus bertindak sebagai koordinator utama yang menjembatani antara kebijakan Perpunas dan pelaksana di tingkat kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara, Bu Khafidhoh, petugas Dinarpus, menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan secara berlapis dan terencana. Ia menyampaikan bahwa

“Kami membentuk tujuh kelurahan mitra utama dan sebelas kelurahan replikasi. Koordinasi dilakukan secara rutin, termasuk melalui kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) agar antar kelurahan bisa saling berbagi pengalaman.”

(Ibu Khafidhoh, 24 September 2025).

Kegiatan PLM sendiri menjadi salah satu komunikasi nyata dari integrasi hirarkis antar lembaga pelaksana yang dalam teori Mazmanian dan Sabatier dianggap sebagai indikator kuat keberhasilan implementasi. Dinarpus juga berperan aktif dalam memfasilitasi bimbingan teknis, pelatihan pustakawan dan monitoring evaluasi kegiatan TPBIS. Selain koordinasi, dukungan sumber daya manusia dan finansial juga menjadi aspek penting. Berdasarkan wawancara, Dinarpus memiliki sekitar 24 pustakawan muda yang aktif terlibat dalam pengelolaan kegiatan literasi dan pembinaan kelurahan mitra. Namun, di tingkat kelurahan masih ditemukan keterbatasan tenaga pengelola. Bu Heni dari Kelurahan Lemponsari menuturkan *“Kami tidak punya petugas khusus perpustakaan, jadi pengelolaan masih dibantu oleh staf kelurahan dan karang taruna.”* (Bu Heni, 24 September 2025).

Dari sisi pendanaan, implementasi TPBIS di Kota Semarang awalnya dibiayai oleh perpunas, namun sejak tahun 2023, pemerintah kota Semarang mulai menyiapkan

alokasi dana mandiri melalui APBD. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan komitmen daerah untuk melanjutkan kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh pak Sapto:

“Kami sekarang sudah siapkan pembiayaan sendiri lewat APBD, supaya TPBIS ini bisa terus berjalan meski nanti bantuan pusat berkurang” (Bapak Sapto, 24 September 2025).

Dengan begitu, dari perspektif Mazmanian dan Sabatier, kebijakan TPBIS di Kota Semarang memiliki kemampuan struktural yang kuat dalam pelaksanaannya. Tujuan kebijakan jelas, struktur koordinasi berjalan baik dan dukungan anggaran mulai mandiri, namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM di tingkat kelurahan agar implementasi dapat berjalan merata di seluruh wilayah mitra.

c) Variable Lingkungan (Nonstatutory Variables affecting implementation)
Faktor lingkungan sosial, politik dan kelembagaan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi TPBIS. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi sosial kota Semarang menunjukkan bahwa masyarakat mulai menunjukkan antusiasme terhadap kegiatan berbasis literasi dan pemberdayaan. Pak Harto dari kelurahan Miroto mengungkapkan:

“Sekarang masyarakat sudah mulai terbiasa datang ke perpustakaan. Ada kegiatan anak - anak, pelatihan UMKM, dan kegiatan ibu - ibu. Jadi, perpustakaan sudah tidak lagi sepi.” (Bapak Harto, 25 September 2025).

Dari sisi politik dan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah terhadap TPBIS cukup tinggi, meskipun sempat mengalami hambatan ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah pada tahun 2024 yang berdampak pada keterlambatan alokasi anggaran. Hal ini diakui oleh Bu Khafidhoh

“Saat pergantian pimpinan, sempat ada keterlambatan karena program TPBIS belum sepenuhnya dikenal pejabat baru. Tapi sekarang sudah mulai normal kembali.” (Ibu Khafidhoh, 24 September 2025).

Selain dukungan sosial dan politik, kondisi teknologi dan fasilitas juga menjadi faktor pendukung. Beberapa kelurahan mitra telah mendapatkan bantuan komputer, jaringan wifi dan koleksi buku baru dari perpustakaan, seperti disampaikan oleh Pak Heri dari Kelurahan Bandarharjo:

“Bantuan fasilitas ini sangat membantu. Anak - anak bisa belajar komputer dan masyarakat bisa akses internet.” (Bapak Heri, 15 Oktober 2025).

Namun, di sisi lain, tantangan lingkungan juga muncul dalam bentuk rendahnya budaya baca dan dominasi penggunaan ponsel di masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Bu Ningsih dari Kelurahan Pudukpayung:

“Sekarang masyarakat lebih sering main HP daripada membaca buku. Jadi, kami perlu kegiatan yang bisa menarik mereka datang”. (Ibu Ningsih, 13 Oktober 2025).

Secara keseluruhan, lingkungan sosial kota Semarang mendukung keberlanjutan TPBIS karena adanya lintas sektor yang melibatkan OPD, PKK, Karang Taruna, dan UMKM. Namun, perlu strategi komunikasi publik yang masif untuk menumbuhkan kesadaran literasi masyarakat.

Jika dilakukan analisis, berdasarkan 3 aspek teori Mazmanian dan Sabatier dalam pelaksanaan TPBIS di kota Semarang dapat dikategorikan sebagai implementasi yang efektif dan adaptif. Karena,

1. Dari sisi karakteristik masalah, Dinarpus mampu memahami kompleksitas isu literasi dan menanggapi dengan pendekatan inklusi berbasis kegiatan masyarakat.

2. Dari sisi struktur kebijakan, TPBIS memiliki arah implementasi yang jelas, dengan koordinasi antar lembaga yang kuat dan dukungan anggaran yang semakin mandiri.
3. Dari sisi lingkungan eksternal. Dukungan sosial dan kelembagaan sudah positif meskipun masih menghadapi tantangan dalam peningkatan budaya literasi dan kesinambungan sumber daya manusia.

Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada komitmen pelaksana, kejelasan tujuan, serta dukungan dari lingkungan politik dan sosial. Dalam konteks TPBIS di Semarang, 3 aspek tersebut telah terbentuk secara cukup baik. Dalam pelaksanaannya program TPBIS oleh Dinarpus Kota Semarang dapat dikatakan berhasil mewujudkan sebagian besar tujuan kebijakan, yaitu menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat dan pemberdayaan sosial ekonomi yang inklusi. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan memperluas dampaknya, masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, strategi promosi literasi dan inovasi kegiatan berbasis komunitas.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen TPBIS (SIM TPBIS) menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kota Semarang. Kehadiran sistem ini memperkuat dimensi efektivitas kelembagaan sebagaimana dijelaskan dalam teori Mazmanian dan Sabatier (1983), khususnya pada variabel *ability of statute to structure implementation*. Melalui sistem ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) Kota Semarang dapat memantau kegiatan, memverifikasi laporan dari perpustakaan kelurahan, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman nasional secara real-time.

Selain meningkatkan efektivitas koordinasi, SIM TPBIS juga menunjukkan kemampuan adaptif Dinarpus terhadap perkembangan teknologi informasi. Dinarpus tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator digital yang mampu menyesuaikan sistem kerja birokrasi lokal dengan infrastruktur teknologi yang dikembangkan oleh Perpustakaan RI. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sistem ini membantu meningkatkan

transparansi pelaporan dan memudahkan komunikasi antara kelurahan, Dinarpus, dan provinsi, meskipun masih ditemukan kendala teknis seperti akses internet dan kompetensi digital di tingkat kelurahan.

Dengan demikian, penggunaan SIM TPBIS memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan TPBIS tidak hanya berorientasi pada peningkatan literasi masyarakat, tetapi juga mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola berbasis data (*data-driven governance*). Hal ini sejalan dengan prinsip teori Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pentingnya dukungan struktural dan adaptasi lingkungan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

2. Peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang terhadap pencapaian keberhasilan dan penerimaan program TPBIS di Perpustakaan Desa

Pelaksanaan TPBIS Kota Semarang tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Dinarpus Kota Semarang sebagai pelaksana utama kebijakan di tingkat daerah. Dinarpus berfungsi sebagai penghubung antara perpustakaan selaku inisiator kebijakan dengan pemerintahan kelurahan dan masyarakat sebagai pelaksana lapangan. Peran Dinarpus ini sangat menentukan keberhasilan serta penerimaan program di tingkat desa atau kelurahan, karena keberadaan mereka bukan hanya sebatas pelaksana administratif, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping dan penggerak utama dalam proses transformasi sosial yang dicetuskan TPBIS. Menurut hasil wawancara dengan ibu Khafidhoh, peran Dinarpus dalam program TPBIS mencakup 3 fungsi utama, yaitu pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Ia menjelaskan bahwa,

“Dinas itu ibarat jembatan antara pusat dan daerah. Kami yang memastikan bagaimana kebijakan perpustakaan bisa dijalankan sesuai kondisi kota Semarang. Jadi, kami turun langsung ke kelurahan untuk melihat bagaimana mereka melaksanakan kegiatan.” (Ibu Khafidhoh, 24 September 2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Dinarpus memiliki peran strategis dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan konteks lokal. Kebijakan TPBIS yang memiliki sifat nasional harus diadaptasi dengan kondisi sosial, budaya dan sumber daya masing - masing wilayah. Melalui pendekatan partisipatif, Dinarpus tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra aktif bagi kelurahan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan berbasis literasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, peran pembinaan Dinarpus diwujudkan melalui kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) dan Stakeholder Meeting (SHM). Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara kelurahan mitra dan berbagai pihak terkait. Bu Khafidhoh menjelaskan bahwa:

“Peer Learning Meeting (PLM) memiliki tujuan supaya kelurahan mitra bisa saling belajar. Misalnya, yang di Miroto punya praktik baik apa, nanti dibagikan ke kelurahan lain. Kita juga hadir untuk memantau, memberikan masukan, dan mendengarkan kendala mereka.” (Bu Khafidhoh, 24 September 2025).

Melalui forum tersebut, Dinarpus berperan memperkuat jaringan kolaboratif antar perpustakaan desa dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sejalan dengan prinsip inklusi sosial. Dina juga secara rutin melakukan pembinaan melalui monitoring lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana kerja tahunan. Selain peran pembinaan, Dinarpus juga berfungsi sebagai fasilitator utama dalam menyediakan sarana dan pelatihan. Dalam hasil wawancara dengan pak Sapto, Dinas telah menyalurkan bantuan berupa buku, perangkat komputer, dan koneksi internet bagi beberapa kelurahan mitra TPBIS. Ia menuturkan,

“Kami pastikan setiap kelurahan mitra punya fasilitas dasar, minimal buku, komputer, dan wifi. Jadi, masyarakat bisa membaca dan juga belajar digital.”
(Bapak Sapto 24 September 2025).

Dinarpus juga bekerjasama dengan berbagai instansi lain dalam mengembangkan kegiatan berbasis literasi produktif. Kolaborasi lintas sektor ini

melibatkan instansi seperti Bappeda, Bagian tata pemerintahan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Wawancara, Bu Khafidhoh menjelaskan,

“TPBIS tidak hanya menggandeng kami, tapi juga melibatkan Bappeda, Tapem, dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi, ini program lintas sektor yang kami jalankan bersama - sama.” (Ibu Khafidhoh, 24 September 2025).

Peran lintas sektor ini memperkuat dimensi inklusi sosial TPBIS karena kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada literasi baca tulis, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kegiatan yang dikembangkan antara lain pelatihan membatik bagi siswa SLB di Miroto, pembuatan kerajinan dari bahan bekas di Lempongsari, serta pelatihan literasi digital dan kewirausahaan di Pudukpayung. Keterlibatan Dinarpus ini dirasakan langsung oleh kelurahan mitra. Pak Harto dari kelurahan Miroto menyampaikan bahwa,

“Peran Dinas itu besar sekali, kamu dibimbing dari awal sampai sekarang. Ada pelatihan dari Dinas dan Perpustakaan, jadi kita tahu bagaimana mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial. Warga juga merasa senang karena kegiatan - kegiatan yang dilakukan langsung bermanfaat.” (Bapak Harto, 25 September 2025).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Ningsih dari Kelurahan Pudukpayung yang menyatakan bahwa pelatihan dari Dinas dan pendampingan fasilitator perpustakaan memberikan pemahaman baru tentang cara mengelola perpustakaan yang lebih inklusi. Ia menuturkan,

“Dulu perpustakaan itu sepi, hanya tempat simpan buku. Sekarang, setelah ada TPBIS dan bimbingan dari Dinas, kamu lebih aktif. Ada pelatihan, kegiatan masyarakat dan warga mulai datang.” (Ibu Ningsih, 13 Oktober 2025).

Pernyataan para narasumber ini menunjukkan bahwa peran Dinarpus Kota Semarang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional. Melalui, bimbingan dan fasilitas yang konsisten, Dinapus mendorong perubahan paradigma atau pola pikir masyarakat terhadap perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan. Selain memberikan pembinaan, Dinarpus juga berperan penting dalam menjaga semangat dan kontinuitas program. Mas Bertus, staf Dinarpus menggambarkan hubungan antara Dinas dan Kelurahan dengan gaya yang hangat dan komunikatif. Ia mengatakan:

“Kuncinya komunikasi. Kami terus menjalin hubungan dengan kelurahan agar program ini tidak vakum. Kadang rasanya seperti pacaran, harus terus saling tanya kabar supaya semangatnya tetap hidup.” (Mas Bertus, 15 Oktober 2025).

Ungkapan ini memperlihatkan pendekatan yang humanis yang dilakukan oleh Dinarpus dalam menjaga hubungan sosial dengan pelaksana lapangan. Komunikasi intensif semacam ini menjadi kunci keberlanjutan implementasi karena memperkuat rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dari pihak kelurahan terhadap program TPBIS. Selain faktor pembinaan dan komunikasi, dukungan kebijakan dan anggaran juga menunjukkan peran strategis Dinarpus dalam keberhasilan program. Berdasarkan penuturan Pak Sapto, dukungan pemerintah Kota Semarang terhadap program TPBIS semakin meningkat, ia menyebutkan bahwa

“Kalau dulu anggaran masih banyak dari pusat, sekarang sudah mulai dari APBD. Tahun 2025 sampai 2026, pemerintah kota Semarang sudah mulai ambil alih pembiayaan pembinaan dan kegiatan TPBIS.” (Baplak Sapto, 24 September 2025).

Peralihan sumber daya pendanaan ini memperlihatkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program serta menunjukkan bahwa Dinarpus berhasil mengadvokasi pentingnya literasi inklusi di

tingkat daerah. Dukungan anggaran lokal juga menjadi indikator penerimaan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah sebagaimana ditekankan dalam teori Mazmanian dan Sabatier, dimana stabilitas dukungan sumber daya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Namun, di sisi lain, beberapa kelurahan masih merasakan bahwa peran Dinarpus perlu lebih diperkuat, terutama dalam hal pendampingan langsung dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Bu Heni dari Kelurahan Lemponsari menuturkan,

“Peran Dinas sebenarnya sudah bagus, tapi seharusnya lebih sering turun. Terkadang kelurahan tidak punya sumber daya manusia yang paham tentang literasi, jadi kalau bisa ada pelatihan rutin untuk aparat kelurahan juga.” (Ibu Heni, 25 September 2025).

Pandangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan pembinaan agar tidak hanya berfokus pada kelurahan mitra utama, tetapi juga mencakup kelurahan replikasi yang sedang berkembang. Dinarpus harus memastikan bahwa semangat inklusi sosial dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang secara merata. Dengan melihat berbagai penuturan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa peran Dinarpus Kota Semarang sangat signifikan dalam menentukan arah, keberhasilan dan penerimaan program TPBIS di tingkat kelurahan. Dinarpus berperan sebagai koordinator utama yang memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan lokal. Melalui pembinaan, fasilitas, komunikasi intensif dan dukungan kebijakan dan anggaran, Dinarpus berhasil menciptakan ekosistem literasi yang inklusi dan kolaboratif.

Namun, efektivitas peran ini masih harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelurahan, perluasan jaringan kerja sama dengan pihak swasta dan akademisi, serta strategi komunikasi publik yang lebih masif agar masyarakat semakin memahami manfaat program. Dengan demikian, peran Dinarpus tidak hanya sebatas pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial yang menumbuhkan budaya literasi dan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan berbasis pengetahuan.

3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi TPBIS di tingkat daerah Semarang Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program TPBIS di tingkat Daerah Semarang

Pelaksanaan TPBIS di kota Semarang tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal yang berperan dalam menentukan keberhasilannya. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, faktor pendukung maupun penghambat merupakan bagian dari variabel lingkungan non statutory yakni faktor sosial, politik, ekonomi dan kelembagaan yang berada di luar substansi kebijakan, namun memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi. Kota Semarang mengimplementasikan TPBIS dan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor pendorong (supporting factors) yang memperkuat jalannya kebijakan, serta faktor penghambat (hindering factors) yang masih perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan.

a. Faktor pendukung implementasi TPBIS di Kota Semarang

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi TPBIS di Kota Semarang adalah dukungan kelembagaan dan komitmen pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Sapto menjelaskan bahwa sejak tahun 2018, Dinarpus Kota Semarang telah menjadi salah satu pelaksana aktif program TPBIS dan terus mengembangkan jaringannya hingga kini. Ia mengatakan bahwa,

“Pemerintah kota Semarang sangat mendukung. Sekarang kami sudah mulai siapkan pembiayaan sendiri lewat APBD. Jadi, tidak hanya bergantung pada pusat. Ini untuk menjamin program bisa terus berjalan walau nanti bantuan dari perpusnas berkurang.” (Bapak Sapto 24 September 2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan kebijakan melalui dukungan finansial dan kelembagaan. Mazmanian dan Sabatier menegaskan bahwa stabilitas dukungan politik dan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, TPBIS di kota Semarang sudah menunjukkan arah

yang positif karena pemerintah daerah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam melanjutkan program secara mandiri. Selain dukungan anggaran, faktor kepemimpinan dan koordinasi Dinarpus juga menjadi aspek penting yang mendorong efektivitas pelaksanaan program. Ibu Khafidhoh menjelaskan bahwa Dinarpus berperan sebagai fasilitator dan penggerak kolaborasi antar instansi. Ia menuturkan,

“Kami tidak bisa kerja sendiri. TPBIS ini memang harus lintas sektor. Kami bekerja sama dengan Bappeda, Tata Pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi, kegiatan di kelurahan bisa lebih luas, tidak hanya baca buku tapi juga ada pelatihan, kegiatan sosial dan ekonomi.” (Ibu Khafidhoh, 24 September 2025).

Pendekatan lintas sektor ini menjadi faktor pendukung signifikan karena bisa memperluas cakupan kegiatan TPBIS menjadi multidimensional tidak hanya literasi baca tulis tetapi literasi digital, literasi keuangan serta literasi keterampilan hidup. Faktor pendukung lainnya adalah adanya tingginya partisipasi masyarakat dan kolaborasi di tingkat kelurahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di beberapa kelurahan mitra, terutama Miroto, pudakpayung dan Bandarharjo mulai aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Pak Harto dari Kelurahan Miroto menyampaikan,

“Sekarang masyarakat sudah mulai terbiasa datang ke perpustakaan. Ada pelatihan membuat, ada kegiatan anak - anak bahkan ibu - ibu datang untuk belajar usaha kecil. Jadi perpustakaan sekarang hidup.” (Bapak Harto, 25 September 2025).



Gambar 5. 1 Aktivitas TPBIS di Kelurahan Miroto Sumber : Dokumentasi SIM TPBIS (2024)

Pengunjung Perpustakaan							Export Data	
No	Tanggal Kegiatan	Nama Perpustakaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Pengunjung Laki Laki	Pengunjung Perempuan
1	May 2024	P24 Perpustakaan Rumah Pintar Brillan Kelurahan Miroto	Jawa Tengah	Kota Semarang	Semarang Tengah	Miroto	5	4
2	Jun 2024	P24 Perpustakaan Rumah Pintar Brillan Kelurahan Miroto	Jawa Tengah	Kota Semarang	Semarang Tengah	Miroto	0	1
3	Aug 2024	P24 Perpustakaan Rumah Pintar Brillan Kelurahan Miroto	Jawa Tengah	Kota Semarang	Semarang Tengah	Miroto	18	8
4	Sep 2024	P24 Perpustakaan Rumah Pintar Brillan Kelurahan Miroto	Jawa Tengah	Kota Semarang	Semarang Tengah	Miroto	60	14
5	Oct 2024	P24 Perpustakaan Rumah Pintar Brillan Kelurahan Miroto	Jawa Tengah	Kota Semarang	Semarang Tengah	Miroto	95	9

Gambar 5. 2 Daftar Kunjungan Perpustakaan di Kelurahan Miroto Sumber : Dokumentasi SIM TPBIS (2024)

Partisipasi masyarakat yang meningkat merupakan hasil dari strategi Dinarpus yang tidak hanya menekankan kegiatan membaca, tetapi juga menautkan literasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi sosial, dimana perpustakaan berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui pengetahuan. Selain faktor sosial, dukungan fasilitas dan teknologi juga menjadi pendorong keberhasilan implementasi. Seperti dijelaskan oleh Pak Heri dari kelurahan Bandarharjo,

“Kami mendapat bantuan buku, komputer wifi dari perpustakaan. Jadi, anak-anak bisa belajar komputer dan mencari informasi lewat internet. Ini membantu sekali.” (Pak Heri, 15 Oktober 2025).

Adanya fasilitas ini memperkuat posisi perpustakaan sebagai ruang belajar digital dan menjembatani kesenjangan literasi teknologi di masyarakat. Fasilitas yang memadai juga meningkatkan daya tarik perpustakaan, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan lingkungan digital. Selain itu, ada lagi faktor pendukung yang lebih penting yaitu kekuatan komunikasi dan hubungan sosial

yang baik di antara Dinarpus dan Kelurahan mitra. Mas Bertus salah satu staf muda Dinarpus, menggambarkan pentingnya komunikasi yang intens dengan cara yang menarik. Ia mengatakan:

“Kami terus berkomunikasi dengan kelurahan saling memberikan kabar agar tetap semangat.” (Mas Bertus, 15 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut, menggambarkan strategi komunikasi sosial yang efektif dalam menjaga motivasi dan rasa kepemilikan di tingkat kelurahan. Pendekatan humanis ini faktor agar model implementasi tradisional, tetapi penting dalam konteks kebijakan berbasis masyarakat. Dengan demikian, faktor pendukung utama dalam implementasi TPBIS di Kota Semarang meliputi:

- a) Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah
 - b) Peran aktif dan koordinasi Dinarpus sebagai fasilitator dan pembina
 - c) Partisipasi dan antusiasme masyarakat
 - d) Kolaborasi lintas sektor antar OPD dan lembaga sosial
 - e) Dukungan fasilitas dan infrastruktur dari perpusnas
 - f) Komunikasi intens dan hubungan sosial yang positif antara dinas dan kelurahan mitra
- b. Faktor penghambat implementasi TPBIS di Kota Semarang

Dibalik berbagai faktor pendukung, pelaksanaan TPBIS juga menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat teknis maupun kultural. Berdasarkan hasil wawancara, faktor penghambat paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kelurahan. Banyak kelurahan mitra yang belum memiliki tenaga khusus untuk mengelola perpustakaan. Ibu Heni dari Kelurahan Lemponsari menuturkan,

“Kita disini tidak punya petugas khusus perpustakaan. Jadi pengelolaannya dibantu anak - anak karang taruna. Kadang juga dari staf kelurahan yang lain.”
(Ibu Heni, 25 September 2025).

Kondisi serupa juga diungkapkan oleh bu Ningsih dari Pudukpayung,
“Idealnya ada petugas khusus, tapi untuk saat ini kami belum punya. Kami masih mengandalkan tenaga dari kelurahan yang lain, jadi kegiatannya belum rutin.”
(Ibu Ningsih, 13 Oktober 2025).

Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak langsung pada konsistensi kegiatan TPBIS. Dalam teori Mazmanian dan Sabatier, faktor seperti ini termasuk dalam kapasitas pelaksana, yang menentukan seberapa jauh kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Tanpa tenaga pelaksana yang kompeten dan fokus, kegiatan literasi sering kali terhenti atau bergantung pada inisiatif individu. Selain kendala sumber daya manusia, perubahan kepemimpinan dan kebijakan di tingkat daerah juga menjadi faktor penghambat sementara dalam implementasi. Bu Khafidhoh mengungkapkan bahwa pergantian pimpinan dinas mempengaruhi alur pembiayaan program pada tahun 2024. Ia menjelaskan,

“Ketika pergantian kepemimpinan, kadang program TPBIS belum sepenuhnya dipahami oleh pejabat baru, jadi sempat terlewat dalam penganggarannya.” (Ibu Khafidhoh, 24 September 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi juga bergantung pada stabilitas politik dan konsistensi arah kebijakan daerah. Dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier, perubahan kepemimpinan seringkali menimbulkan *“policy discontinuity”* atau gangguan dalam proses implementasi karena adanya pergeseran prioritas program. Faktor penghambat lain yaitu rendahnya budaya literasi masyarakat, terutama di wilayah - wilayah yang masih memandang perpustakaan sebagai tempat yang “sepi” dan “formal”. Ibu Heni menyebutkan,

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu manfaat perpustakaan. Kadang mereka pikir itu hanya untuk anak sekolah.” (Ibu Heni, 25 September 2025).

Kendala ini juga disampaikan oleh Pak Harto yang menilai bahwa dominasi teknologi digital membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada membaca buku. Ia menyampaikan,

“Sekarang orang lebih tertiary bermain ponsel daripada membaca buku. Jadi, memang harus ada kegiatan yang menarik supaya mereka mau datang ke perpustakaan.” (Pak Harto, 25 September 2025).

Selain itu, keterbatasan promosi dan publikasi kegiatan juga menjadi hambatan tersendiri. Beberapa kelurahan mitra belum memiliki strategi komunikasi publik yang efektif untuk menarik minat masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian besar kegiatan hanya diketahui oleh kelompok tertentu dan belum menyebar luas di masyarakat. Kendala teknis lainnya yaitu keterbatasan sarana ruang baca yang belum representatif, terutama di kelurahan dengan area perpustakaan kecil. Walaupun sudah ada bantuan fasilitas dari perpustakaan, beberapa tempat masih memerlukan penataan ulang agar lebih nyaman dan menarik.

Faktor pendukung dan penghambat dalam program TPBIS ini dilihat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, tetapi di sisi lain masih menghadapi tantangan dalam aspek sumber daya, keberlanjutan kebijakan dan kesadaran literasi. Faktor pendukung memperlihatkan bahwa TPBIS di Semarang telah mencapai tahapan adaptif, dimana pelaksanaannya mampu menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal melalui kolaborasi dan inovasi. Namun, faktor penghambat menegaskan harus adanya pendekatan penguatan kapasitas (*capacity building*), baik dalam hal sumber daya manusia, strategi komunikasi, maupun perencanaan jangka panjang. Dengan memperkuat aspek pembinaan, memastikan kesinambungan dukungan anggaran, serta meningkatkan promosi literasi yang inklusif, maka TPBIS di kota Semarang berpotensi menjadi model keberhasilan transformasi perpustakaan daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier, peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam implementasi TPBIS menunjukkan karakteristik efektivitas kelembagaan dan

adaptivitas sosial. Dinarpus efektif dalam hal perencanaan dan koordinasi lintas pihak, serta pelaksanaan kegiatan literasi yang sejalan dengan tujuan nasional. Di sisi lain, Dinarpus juga adaptif karena mampu menyesuaikan kegiatan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan, seperti pengembangan wirausaha dan literasi digital. Kedua aspek ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan publik yang berhasil di tingkat daerah menuntut keseimbangan antara kejelasan kebijakan dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lapangan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kota Semarang menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983), dapat disimpulkan bahwa Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) Kota Semarang memiliki peran yang efektif dan adaptif dalam menjalankan kebijakan nasional di tingkat daerah.

Secara efektif, Dinarpus berperan sebagai pelaksana utama yang mampu mengkoordinasikan berbagai kegiatan TPBIS di tingkat kelurahan, mulai dari perencanaan, pembinaan, hingga pelaporan. Implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan pedoman nasional karena adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur melalui rapat kerja, Peer Learning Meeting (PLM), dan Stakeholder Meeting (SHM). Kejelasan tujuan dan arah kebijakan menjadikan Dinarpus berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan komunitas berbasis inklusi sosial.

Efektivitas tersebut semakin diperkuat dengan adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen TPBIS (SIM TPBIS) yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional RI. Melalui sistem ini, seluruh laporan kegiatan perpustakaan kelurahan dapat dipantau, diverifikasi, dan dievaluasi secara real-time, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih transparan dan akuntabel. SIM TPBIS juga mencerminkan kemampuan Dinarpus untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan memperluas efektivitas kebijakan melalui pendekatan digital.

Dari sisi kapasitas kelembagaan, keberhasilan implementasi TPBIS juga didukung oleh bantuan fasilitas dari Perpustakaan Nasional berupa koleksi buku, perangkat komputer, printer, dan layanan internet. Bantuan ini memperkuat kemampuan pelaksana di tingkat kelurahan untuk menjalankan kegiatan literasi digital dan memperluas akses informasi masyarakat. Dengan dukungan tersebut, Dinarpus mampu memastikan bahwa program TPBIS berjalan tidak hanya secara

administratif, tetapi juga substantif dalam meningkatkan literasi dan pemberdayaan sosial masyarakat.

Secara adaptif, Dinarpus menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Setiap kelurahan mengembangkan model kegiatan yang berbeda sesuai potensi masyarakatnya, seperti pelatihan digital, usaha mikro, dan kegiatan literasi anak. Adaptivitas ini menandakan bahwa Dinarpus telah berhasil menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks daerah secara kreatif tanpa kehilangan arah kebijakan utamanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi TPBIS di Kota Semarang telah berjalan efektif dan adaptif, baik dari segi kelembagaan, teknologi, maupun sosial. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada kejelasan kebijakan, kapasitas pelaksana, serta kemampuan lembaga dalam beradaptasi terhadap dinamika sosial dan teknologi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan model implementasi kebijakan berbasis literasi sosial yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen modern.

Namun, masih terdapat hambatan yang perlu diperhatikan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengelola perpustakaan di tingkat kelurahan, kurangnya pelatihan lanjutan, serta minimnya strategi promosi literasi digital. Beberapa kelurahan belum memiliki tenaga khusus yang mengelola program TPBIS secara berkelanjutan, sehingga kegiatan masih bersifat kontemporer. Selain itu, tantangan budaya digitalisasi juga muncul karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada mengakses literasi formal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TPBIS di Kota Semarang telah berhasil mencapai tujuan kebijakan secara substantif. Program ini telah merubah fungsi perpustakaan dari sekadar tempat membaca menjadi ruang pemberdayaan dan inklusi sosial, sejalan dengan visi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam meningkatkan pendidikan berkualitas, mengurangi kesenjangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah

daerah, masyarakat dan perpustakaan dengan Dinarpus Kota Semarang sebagai penggerak utama di tingkat lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi TPBIS oleh Dinarpus kota Semarang merupakan contoh praktik baik (best practice) dalam penerapan kebijakan literasi berbasis inklusi sosial di daerah, yang menunjukkan bahwa kebijakan nasional dapat diadaptasi secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, beberapa terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik untuk Dinarpus Kota Semarang, pemerintah daerah maupun peneliti dan lembaga akademik di masa mendatang.

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan. Dinarpus harus meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan di tingkat kelurahan. Pelatihan reguler mengenai manajemen perpustakaan, literasi digital dan pemberdayaan komunitas harus diadakan agar pelaksanaan TPBIS dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Strategi promosi dan komunikasi publik yang lebih masif. Dinarpus Kota Semarang diharapkan mengembangkan strategi komunikasi publik yang inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat TPBIS. Penggunaan media sosial, kampanye digital, dan kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk menarik minat generasi muda agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan literasi dan pelatihan.
3. Mendorong replikasi program TPBIS di seluruh wilayah Kota Semarang. Adanya keberhasilan di 4 kelurahan mitra utama, Dinarpus disarankan untuk memperluas implementasi TPBIS ke kelurahan lain di kota Semarang. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan replikasi dengan pendekatan pendampingan intensif, agar seluruh perpustakaan kelurahan mampu bertransformasi menjadi pusat kegiatan inklusi sosial.

Dengan penerapan saran - saran tersebut, diharapkan program TPBIS di Kota Semarang dapat terus berkembang menjadi model nasional dalam penguatan

literasi masyarakat dan pemberdayaan sosial berbasis pengetahuan. Dinarpus kota Semarang diharapkan mampu mempertahankan perannya sebagai penggerak utama literasi inklusi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan akademisi untuk menciptakan perpustakaan yang berdaya, terbuka dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyana, C. (2021). The importance of rural library services based on social inclusion. Consensus. <https://consensus.app/papers/the-importance-of-rural-library-services-based-on-social-adriyana-cahyaningtyas/42db30cbcad0586d9bc32d3ce4d6c0f7/>
- Gao, X. (2020). *The causes analysis of public policy implementation*. Consensus. <https://consensus.app/papers/the-causes-analysis-of-public-policy-implementation-gao-xu/a8231a2bc4fa5fa29f396ee2972ed8ea/>
- Haryanti, W. T. (2020). Perpustakaan berbasis inklusi sosial. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 2(2), 114–117. <https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/728/536>
- Haryanto, T. (2022). Pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam peningkatan literasi masyarakat. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 21(3), 333–344. <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/1648>
- Heriyanto, R., & Rahman, A. (2021). *Librarian perceptions of the implementation of the library transformation program based on social inclusion*. Consensus. <https://consensus.app/papers/librarian-perceptions-of-the-implementation-of-the-heriyanto-rahman/8d7dd50cc4c65a71b76538d71945a47e/>
- Hidayat, G., & Ghassani, N. (2022). *Pemanfaatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial*. Consensus. <https://consensus.app/papers/pemanfaatan-transformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-hidayat-ghassani/dd0fce9793ae54b49cde8c1f4120465e/>
- Humaira, J. (2022). *Implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pidie* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39595/>
- Istyarini, A., & Rohmah, L. (2024). Implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Kelurahan Cipayang, Jakarta Timur. *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 6(1), 18–22.

- Julia, H. (2022). *Implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pidie* [Dokumen skripsi]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39595/1/Julia%20Humaira,180503137,%20FAH,%20IP.pdf>
- Maxwell, J. A. (2018). The value of qualitative inquiry for public policy. *Qualitative Inquiry*, 26(2), 177–186. <https://consensus.app/papers/the-value-of-qualitative-inquiry-for-public-policy-maxwell/1f0153faf43857aaaf8bacdd5abc59a/>
- Maisarah, G., & Yusran, R. (2025). Exploring the Key Factors in the Implementation of the GERMAS Policy: A Public Management Perspective Using the Mazmanian and Sabatier Framework. *Journal of Educational Management Research*. <https://doi.org/10.61987/jemr.v4i4.1144>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=U4IU_-wJ5QEC
- Mubarok, S., Suryadi, S., & Setyowati, R. (2021). *Policy implementation analysis: Exploration of George C. Edwards III*. Consensus. <https://consensus.app/papers/policy-implementation-analysis-exploration-of-george-suryadi-setyowati/a600621166ea5cdfaf6138768b025d04/>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2017). *Seribu cerita PerpuSeru: PerpuSeru ciptakan dampak kemandirian ekonomi*. <https://www.perpusnas.go.id/berita/seribu-cerita-perpuseru-:-perpuseru-ciptakan-dampak-kemandirian-ekonomi>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2021). *TPBIS, wujud komitmen Indonesia terhadap pembangunan global*. <https://www.perpusnas.go.id/berita/tpbis-wujud-komitmen-indonesia-terhadap-pembangunan-global>